

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2007-2026

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menurut perkembangan selama sedasawarsa terakhir, dan berbagai tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan dengan memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan mensolusi permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945 maka Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2026 adalah :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU MANDIRI DAN ADIL

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur adalah sebagai jabaran secara bertingkat dari Visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut dapat ditentukan indikan keberhasilan pembangunan untuk mem-permudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi ke-majuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus berujungkan kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan

bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial umumnya menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Besaran nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM/HDI. Kemajuan secara sosial juga diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata dan kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatentkan serta jumlah industri manufaktur hasil R&D yang diekspor.

Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasi-an dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasi-an. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variabel yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam ke modal sumberdaya manusia untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering

ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif-demokratis.. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Visi pembangunan daerah diwujudkan melalui misi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. **Mewujudkan daya saing masyarakat yang meningkat secara bertahap-berkelanjutan** melalui penguatan dan peningkatan peran dan sumbangan perekonomian wilayah dengan cara memanfaatkan keunggulan beda dan saing terutama jejaring (*networking*) interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi antar wilayah, mengefektifkan peningkatan kualitas pengelolaan dan keluaran pembangunan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan modal sumberdaya manusia; memperdayagunakan dan menciptakan IPTEKS, sarana dan prasarana serta reformasi hukum, politik dan mental masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan perlu dijalankan dengan paradigma pembangunan yang berpemerataan dan berkeadilan melalui redistribusi kesempatan yang lebih desentralis kepada wilayah dan kelompok masyarakat perifer dengan cara meningkatkan sediaan dan mutu sarana dan prasarana untuk mobilisasi geografis-sosial dan membesarkan akses masyarakat margin secara ekonomi, gender dan geografis untuk memperoleh sentuhan layanan dan partisipasi pembangunan; serta keberpihakan dan kepedulian politik pembangunan kepada wilayah dan kelompok margin dan yang rentan.
2. **Mewujudkan masyarakat hukum yang demokratis** adalah membangun satu masyarakat berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi budaya hukum di semua tataran baik kelembagaan maupun individual, menegakkan hukum secara murni dan konsekuen; medinamiskan dan meningkatkan kualitas kehidupan kelembagaan dan individual yang lebih demokratis berdasarkan asas keadilan; memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
3. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan** melalui pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan baik sumberdaya manusia, ekonomi, sosial-politik, budaya dan lingkungan untuk memperoleh kekuatan perubahan dan ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat untuk mempertahankan persatuan, kesatuan jati diri serta hargadiri.
4. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah berkeseimbangan lingkungan** adalah kemajuan, kemandirian dan keadilan pembangunan

wilayah berlangsung dalam lingkungan yang berkesimbangan, serasi dan lestari, untuk itu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan dikurangi melalui peran sumberdaya manusia dan IPTEK..

5. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika dan berbudaya** merupakan penguatan dan penegasan jatidiri, dan mempertahankan keberadaan budaya baik dalam bentuk nilai dan norma, perilaku, sifat religiusitas, menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan untuk menghindari benturan dan friksi antar golongan dan meningkatkan solidaritas sosial, untuk memantapkan landasan spiritual, moral dan etik pembangunan wilayah
6. **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar wilayah dan masyarakat**, yaitu memposisikan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmitter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat antar provinsi-negara- untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah di multi dimensi.